

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, salah satunya adalah kesulitan keuangan. Banyak orang berpendapat bahwa penyebab masalah kesulitan keuangan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan. Selain itu, kesulitan keuangan juga dapat timbul dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan, kesalahan dalam pengelolaan kredit dan kurangnya perencanaan keuangan, serta pengetahuan terhadap melek keuangan dirasa belum maksimal.

Dalam beberapa tahun ini, isu literasi keuangan (*financial literacy*) sedang hangat di bahas oleh berbagai belahan dunia. Agar masyarakat di suatu negara memiliki finansial yang baik maka negara tersebut mengupayakan melek keuangan kepada masyarakatnya. Seiring peningkatan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pasar keuangan, pemahaman akan literasi keuangan (*financial literacy*) menjadi hal yang penting demi menciptakan masyarakat yang berkualitas. Tujuan pemahaman tersebut agar tidak salah dalam pengelolaan keuangan dan mampu memberikan dampak positif bagi roda perekonomian baik secara individu ataupun negara itu sendiri.

Menurut Lusardi & Mitchell (2007) Literasi keuangan ialah pengetahuan keuangan seseorang dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Menurut Jumpstar, Coalition dalam Huston (2010), mengartikan literasi keuangan terjadi saat seseorang memiliki kemampuan dalam merencanakan dan mengelola keuangannya dengan baik untuk mencapai tujuan. Apabila terjadi ketidakpahaman terhadap literasi keuangan tentu akan berdampak pada pembangunan ekonomi negara. Terhambatnya pembangunan ekonomi negara diakibatkan kurangnya akses ke lembaga keuangan, sehingga banyak masyarakat yang terjebak dalam modus kejahatan dari penjual produk-produk keuangan.

Menurut CIA World Factbook (2016) Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak setelah China, India, dan Amerika. Tak bisa dipungkiri, Indonesia juga memiliki penduduk mayoritas beragama islam. Seiring pesatnya perkembangan pasar keuangan, selain pasar keuangan konvensional juga memunculkan pasar keuangan berbasis syariah. Hal tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar beralih ke industri pasar keuangan syariah dimana sistem yang digunakan sesuai dengan aturan syariah.

Berdasarkan Laporan Survei Nasional dan Inklusi Keuangan tahun 2016 yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong *well literature*

sebesar 29,66 persen. Sedangkan tingkat literasi keuangan syariah yang tergolong *well literature* sebesar 8,11 persen.

TABEL 1.1
Tingkat Literasi Keuangan dan Syariah Penduduk Indonesia, 2016

Indeks	Indeks (%)	
	2013	2016
Literasi Keuangan	21,84	29,66
Literasi Keuangan Syariah	-	8,11

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2016

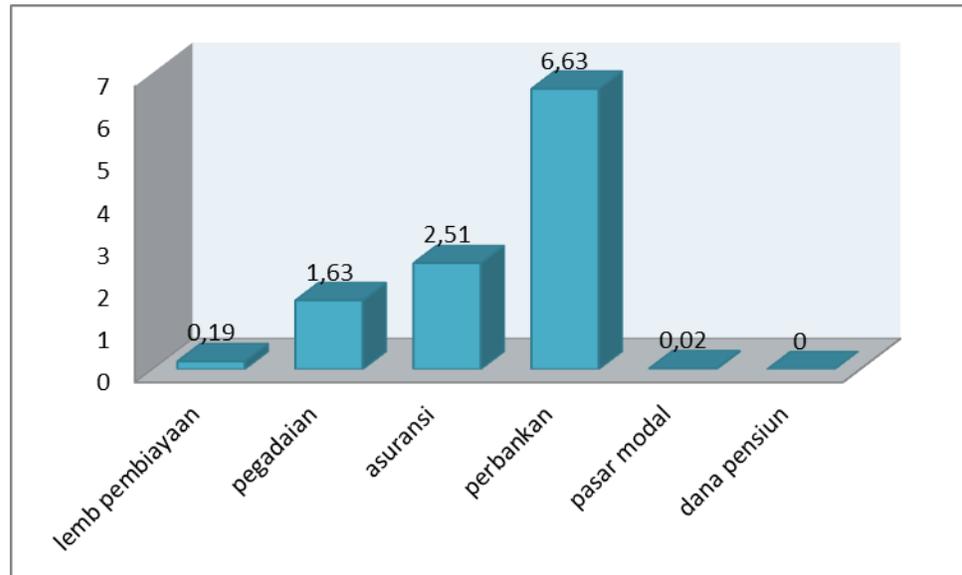
Berdasarkan data di atas, angka indeks literasi keuangan tahun 2016 mengalami peningkatan dari survei tahun sebelumnya. Meskipun indeks tersebut mengalami peningkatan pada angka tetapi masih mencerminkan rendahnya tingkat literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari angka 8,11 persen pada literasi keuangan syariah, dimana dapat disimpulkan bahwa kurang dari separuh jumlah penduduk Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan dengan baik pada produk dan jasa keuangan syariah. Rendahnya pemahaman literasi keuangan syariah tentu akan memperlambat perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Literasi keuangan syariah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Pemerintah bersama lembaga keuangan syariah perlu mengupayakan pemahaman melek keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia. Salah satu upaya peningkatan literasi keuangan syariah adalah edukasi finansial (*financial education*). Menurut Mendari dan Kewal (2013: 2), edukasi finansial adalah

proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani.

Dalam pencapaian akses pada industri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan berbagai program melalui peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI). SNLKI tersebut menegaskan bahwa OJK bersama pemerintah bertujuan untuk memperluas akses masyarakat pada industri keuangan yaitu salah satunya melalui edukasi finansial (Menurut Yuliawan, Indra – Head of Corporate Social Responsibility Allianz Indonesia dalam Majalah OJK edisi April 2014 : 09).

Selain peran serta Pemerintah dan Lembaga keuangan terkait, peran mahasiswa terutama perguruan tinggi islam maupun non islam untuk menyemarakkan dan memaksimalkan edukasi finansial syariah juga sangat penting dengan harapan literasi keuangan syariah semakin meningkat. Presentase data indeks literasi keuangan syariah berdasarkan tingkat sektoral dapat disajikan pada diagram berikut :



Sumber : Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, 2016

GAMBAR 1.1
Diagram Presentasi Indeks Literasi Keuangan Syariah (Sektoral)

Diagram diatas menunjukkan presentase indeks keuangan syariah berdasarkan tingkat sektoral di Indonesia yang diakses melalui website OJK. Indeks literasi keuangan syariah tertinggi sebesar 6,63 persen pada sektor perbankan, diikuti oleh sektor perasuransian sebesar 2,51persen, kemudian sektor pegadaian sebesar 1,63 persen, lembaga pembiayaan sebesar 0,19 persen, dan sektor pasar modal sebesar 0,02 persen, serta indeks terendah yaitu sektor dana pensiun sebesar 0 persen.

Literasi keuangan syariah di setiap sektoral masih terbilang rendah, yaitu kurang dari separuh dari jumlah presentase. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga pembiayaan berbasis lembaga keuangan mikro syariah merupakan kunci utama bagi usaha sektor kecil dalam

mengakses keuangan syariah. Kehadiran BMT menekankan pada aspek produksi dan investasi kepada masyarakat ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Tujuan BMT yaitu mengembangkan ekonomi dan berfungsi sebagai jantung kegiatan ekonomi yang menjangkau lapisan masyarakat kecil menengah.

Selain sebagai lembaga pengelola dana masyarakat berbasis syariah, BMT juga memiliki fungsi sebagai lembaga sosial bagi masyarakat, hal ini dikarenakan BMT tidak hanya memiliki kewenangan menarik dan mengelola dana masyarakat tetapi juga upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Kehadiran BMT merupakan peluang besar bagi pengusaha kecil dimana terjadi peningkatan jumlah pengusaha kecil dari waktu ke waktu. BMT tersebut membantu masyarakat usaha kecil dan mikro terhindar dari sistem Riba, Gharar, Ijon dan lain-lain (Mufidah, *et al*, 2014:9). Menurut Sholahudin, M dan Murwanti, S (2013:300), BMT menyediakan berbagai macam produk-produk yang ditawarkan berupa kredit atau pembiayaan kepada masyarakat pada bidang sektor pertanian, industri kecil, perdagangan barang dan jasa, perdagangan kecil, koperasi dan lainnya.

Pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa pedagang pasar tradisional termasuk dalam kategori sektor perdagangan kecil. Pedagang pasar tradisional di Indonesia perlu mendapatkan edukasi keuangan syariah dengan harapan pedagang pasar dapat mengoptimalkan keuangannya pada sektor lembaga keuangan mikro syariah Indonesia, yaitu BMT. Peran BMT kepada

pedagang pasar akan menjadi tombak pembangunan ekonomi dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil karena lembaga keuangan mikro syariah ini lebih menembus pada kalangan masyarakat bawah (*grass root*).

TABEL 1.2
Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Wilayah Jawa 2016

Wilayah	Indeks (%)
Daerah Istimewa Yogyakarta	9,45
Jawa Tengah	11,17
Jawa Barat	7,79
DKI Jakarta	16,36
Jawa Timur	29,35

Sumber : Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

Berdasarkan data diatas, Indeks literasi keuangan syariah di wilayah jawa belum memiliki akses yang baik dalam mengakses lembaga keuangan syariah. Indeks literasi keuangan syariah tertinggi yaitu Jawa Timur sebesar 29,35 persen. Sedangkan posisi terendah terdapat di wilayah Jawa Barat yaitu sebesar 7,79 persen dan diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 9,45 persen.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang terkenal akan identitas tradisional, termasuk dalam hal ini yaitu pasar tradisional di Yogyakarta. Pasar tradisional di Yogyakarta masih eksis hingga saat ini, terutama pasar yang terdapat di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan pusat area pariwisata bagi penduduk lokal maupun mancanegara. Kehadiran

pasar-pasar tradisional di Kota Yogyakarta merupakan daya tarik tujuan wisata bagi para turis dan menjadi sentra perekonomian masyarakat kecil di Kota Yogyakarta. Selain itu, Kota Yogyakarta memiliki penduduk dimana sebagian besar penduduknya merupakan kaum terpelajar.

Menurut Data Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, terdapat 29 pasar tradisional tersebar di Kota Yogyakarta yang terbagi dalam 9 unit pelaksana teknis. Banyaknya jumlah pasar tradisional di Kota Yogyakarta ini diharapkan mampu menopang perekonomian daerah terutama pada masyarakat golongan ke bawah. Jumlah pasar tradisional ini diikuti dengan banyaknya jumlah pedagang yang ada di dalamnya. Pedagang pasar tradisional sering melupakan pentingnya perencanaan dan pencatatan keuangan terutama pengelolaan keuangan secara syariah.

BMT yang berperan sebagai salah satu wadah lembaga keuangan syariah bagi masyarakat kalangan bawah masih sering dilupakan oleh para pelaku pedagang pasar tradisional sehingga menyebabkan perkembangan kurang berjalan dengan baik. Padahal, persebaran BMT di Kota Yogyakarta teritung cukup banyak. Dengan alasan tersebut, pedagang pasar tradisional hendaknya mempunyai edukasi keuangan syariah yang cukup sehingga mendapatkan pemahaman akan literasi keuangan syariah dan menyadari pentingnya pengelolaan keuangan pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat literasi keuangan syariah (*financial*

literacy) yang harus dimiliki pedagang pasar tradisional demi terciptanya pemahaman akan literasi keuangan syariah. Penelitian ini diberi judul **“ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PELAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Batasan Masalah

Batasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya fokus pada pedagang pasar tradisional yang tersebar di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, didapat beberapa rumusan masalah mengenai tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta?
2. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin?
3. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta berdasarkan usia?

4. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta berdasarkan pendidikan?
5. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar di Kota Yogyakarta berdasarkan pengeluaran?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin.
3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta berdasarkan usia.
4. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar di Kota Yogyakarta berdasarkan pendidikan.
5. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku pedagang pasar di Kota Yogyakarta berdasarkan pengeluaran

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengaruh bagi :

1. Pelaku pedagang pasar tradisional, sebagai solusi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keuangan atau melek keuangan terutama keuangan syariah.
2. Pemerintah dan lembaga keuangan mikro terkait, sebagai referensi agar dapat lebih aktif dalam mengedukasi keuangan syariah kepada pelaku pedagang pasar tradisional.
3. Para akademik sebagai referensi dalam mengkaji perkembangan literasi keuangan syariah pada penelitian selanjutnya.